

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, yaitu seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian). Industri yang paling banyak di Provinsi NTB adalah industri kecil dan menengah. Di antara keduanya, yang paling dominan adalah industri kecil.

Industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Perindustrian Provinsi NTB dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, baik itu permasalahan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

1. Data base IKM (jumlah, jenis komoditi, potensi kuantitatif, sebaran, dan lain-lain)

Hal ini disebabkan karena kegiatan pendataan tidak didukung ketersediaan anggaran dan aparatur yang sesuai kebutuhan. Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat membantu hal ini juga mengalami permasalahan yang sama, termasuk juga kelompok atau asosiasi IKM.

2. Kapasitas aparatur belum sesuai dengan kebutuhan

Hal ini disebabkan karena:

- jumlah aparatur yang berlatar belakang industri atau yang terkait langsung dengan bidang industri jumlahnya terbatas.
- minimnya kegiatan bimbingan teknis bagi aparatur yang bertugas sebagai pembina IKM.

3. Etos kerja aparatur yang masih kurang, hal ini disebabkan karena:
 - motivasi kerja yang rendah
 - kurangnya pengetahuan dan minimnya keinginan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap hal yang baru atau asing
 - ketidakmampuan dalam penyelesaian masalah
4. Efektivitas dalam penyelenggaraan pelatihan terhadap IKM masih kurang, hal ini disebabkan karena IKM sebagai sasaran kegiatan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang sama.
5. Kegiatan monitoring dan evaluasi kurang optimal
hal ini disebabkan karena aparatur tidak dapat menjangkau IKM yang tersebar di seluruh NTB karena kendala operasional.
6. Tumpang tindih tugas dan fungsi antara Dinas Perindustrian Provinsi dengan Dinas lainnya.
Hal ini disebabkan karena identifikasi stakeholder yang kurang tepat dalam pengelolaan sektor industri. Pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang efektif dan efisien karena terjadi konsentrasi pada IKM-IKM tertentu sedangkan di sisi lain masih banyak IKM yang belum tersentuh.
7. Hasil penelitian, dan pengembangan teknologi tepat guna belum diketahui secara luas, sehingga penerapannya belum optimal
8. Komoditi unggulan daerah, utamanya hasil pertanian belum diolah secara optimal dalam daerah sendiri.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dinyatakan bahwa Dinas Perindustrian merupakan Dinas Daerah tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, yaitu tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode Tahun 2018-2023 adalah ***“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”***. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 misi, yaitu:

1. NTB BANGKIT KEMBALI DAN AMAN : Akselerasi pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dan mitigasi bencana.
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI : Akselerasi transformasi birokrasi yang bersih dan melayani.
3. NTB SEHAT DAN CERDAS : Akselerasi peningkatan kualitas daya saing sumberdaya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB ASRI DAN LESTARI : Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI : Akselerasi penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pariwisata dan industri.
6. NTB ADIL DAN BERKAH : Akselerasi perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter, penegakan hukum yang berkeadilan.

Dari 6 (enam) misi di atas, Dinas Perindustrian Provinsi NTB terkait dengan misi kelima, yaitu NTB Adil, Sejahtera, dan Mandiri. Terdapat tujuan dan sasaran misi tersebut yang secara terkait secara langsung Dinas Perindustrian Provinsi NTB, yaitu :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian Provinsi NTB
Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	Meningkatnya Industri Kecil dan Menengah	Persentase industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah dari 1,18 % (2018) menjadi 3,55 % (2023)

Sumber : RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 – 2023

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi perwujudan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Periode Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendorong
Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian Provinsi NTB
Ditinjau Dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018 - 2023

Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya kompetensi SDM pelaksana sektor industri 2. Ketersediaan bahan baku industri yang masih belum terdata dengan baik 3. Pemahaman terhadap penggunaan mesin dan alat otomatisasi pengolahan yang masih rendah. 4. Standarisasi produk yang belum sesuai dengan SNI 5. Belum adanya integrasi dengan sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya komoditas sebagai bahan baku industri yang beragam 2. Terbentuknya workshop pada STIP sebagai penyedia mesin dan peralatan pengolahan bahan baku industri. 3. Branding NTB sebagai salah satu sentra industri di Indonesia khususnya industri wisata. 4. Posisi Provinsi NTB sebagai lokasi destinasi wisata nasional

<ul style="list-style-type: none"> 6. Belum adanya kawasan industri yang terintegrasi 7. Pola usaha industri yang masih tersebar di Kabupaten/ Kota. 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Telah tumbuhnya IKM di lingkup Kabupaten/ Kota di berbagai sektor 6. Peluang pasar yang terbuka untuk pemasaran hasil industri 7. Infrastruktur teknologi dasar yang semakin berkembang
--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Berdasarkan sasaran jangka menengah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 31.1/M-IND/PER/3/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian RI dan sasaran jangka menengah perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan perindustrian, dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendorong
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Ditinjau Dari
Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019

Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> 1. Integrasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian Provinsi NTB dengan Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah di Pulau Sumbawa yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian belum optimal. 2. Keterbatasan anggaran pendamping yang mendukung program dan kegiatan Kementerian Perindustrian dan Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota. 3. Monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan Kementerian Perindustrian di daerah belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja masing-masing cukup baik. 2. Komitmen kuat pimpinan daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran produk lokal, misalnya dengan menerbitkan peraturan tentang keutamaan penggunaan produk lokal. 3. Seluruh kabupaten/kota menjadi tujuan wisata nasional maupun internasional. Adanya kebijakan di sektor pariwisata akan mempengaruhi perkembangan sektor industri. Terlebih lagi dengan wisata halal yang diunggulkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, yang diperkirakan akan berdampak pada industri olahan makanan dan minuman.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan pengaturan tentang sektor industri dalam RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Faktor-Faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendorong
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Ditinjau Dari RTRW dan KLHS Provinsi NTB

Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
<ol style="list-style-type: none">1. Sinkronisasi pembangunan industri yang berbasis lingkungan masih belum optimal.2. Pola pemanfaatan sumberdaya dalam proses pembangunan industri yang belum terkendali dengan baik.3. Pola perencanaan tata ruang wilayah yang belum sinkron dengan sebaran industri yang sedang tumbuh di Provinsi NTB.4.	<ol style="list-style-type: none">1. Telah dibangunnya konsep kawasan industri dalam dokumen RTRW dan KLHS.2. Komitmen pimpinan yang tertuang dalam bentuk regulasi dan kebijakan.3. Kawasan Peruntukan Industri yang meliputi kawasan agroindustri dan pengembangan IKM sudah ditetapkan.4. Penetapan kawasan yang mengintegrasikan sektor industri dengan pariwisata, perdagangan-jasa, perikanan, pertanian, dan peternakan sudah ditetapkan.5. Daya dukung lingkungan yang relatif cukup baik.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan rencana strategis perangkat daerah, maka isu strategis ini merupakan isu strategis dalam bidang industri. Suatu isu menjadi isu strategis jika suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya bila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dalam sektor perindustrian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

BACKWARD :

1. Kurangnya akses terhadap bahan baku, persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku
2. Modal kerja terbatas, kompetensi tenaga kerja yang kurang mumpuni dan terbatasnya penguasaan teknologi.
3. Terbatasnya kemampuan IKM dalam menyusun rencana usaha manajemen dan bisnis.
4. Belum adanya standarisasi terkait desain dan kualitas produk.
5. Peran unit sektoral sebagai penyedia bahan baku yang masih belum terkoordinir dengan baik.

PENGOLAHAN :

1. Masih rendahnya penggunaan mesin dan alat-alat otomatisasi untuk melakukan pengolahan produk.
2. Desain dan packaging kemasan yang belum beragam

FORWARD :

1. Pasar yang belum siap menerima produk hasil IKM karena belum sesuai SNI dan memiliki sertifikasi halal.
2. Belum adanya keunggulan komparatif untuk produk IKM di Provinsi NTB untuk bersaing di pasar nasional.